



RELEASE
KUNJUNGAN KERJA
WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA
DAN PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KE ARAB SAUDI

MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025
TANGGAL 28 NOVEMBER – 4 DESEMBER 2024

Dalam kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, MAP. dan Pimpinan Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi tanggal 28 November – 4 Desember 2024 dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal ingin memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Soebianto dapat dilaksanakan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia.
2. Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji yang terbesar di dunia sehingga jamaahnya perlu mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman.
3. Ibadah haji merupakan ibadah yang melibatkan jutaan jamaah sehingga akan selalu penuh dengan kepadatan, namun bagaimana pun DPR RI ingin jamaah tetap mendapatkan kenyamanan.
4. Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang memastikan akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) dan memulai pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M sehingga memerlukan gambaran mengenai komponen-komponen penting dalam besaran BPIH.
5. Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengajak semua syarikah yang akan menjadi penyedia layanan haji bagi jamaah haji Indonesia untuk berkompetisi secara sehat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jamaah haji Indonesia.
6. Titik krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji ada di Arafah, Mudzalifah dan Mina (Armuzna), sehingga diperlukan solusi taktis agar tidak terjadi penumpukan jamaah, seperti dengan metode Murur atau bermalam di bus di Mudzalifah. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan agar 60.000 jamaah bisa melakukan murur dengan konsekuensi jatah makan mereka di Mina diberikan dalam bentuk uang.

7. Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) Dr. Nasrullah Jasam selaku pemegang kewenangan Pemerintah Indonesia dalam urusan haji perlu melobby Pemerintah Arab Saudi dan Kidana yang memiliki otoritas di Mina sehingga jamaah haji Indonesia dapat menduduki lokasi yang strategis.
8. Dubes RI untuk Arab Saudi Dr. Abdul Aziz Ahmad mengakui bahwa kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan otoritas Pemerintah Indonesia melainkan juga otoritas Pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu perspektif kebijakan haji harus didudukkan secara proporsional, tidak hanya meminta Pemerintah Indonesia Cq. Kemenag untuk bekerja keras dalam melayani jamaah haji, tetapi juga Pemerintah Arab Saudi Cq. Kementerian Haji dan Umrah harus bersungguh-sungguh dalam memperbaiki pelayanan haji dan tidak menggonta-ganti aturan.
9. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi ke depan adalah menswastanisasi pelayanan haji, sehingga Pemerintah Indonesia harus segera merespon kebijakan itu dengan menyiapkan pihak-pihak swasta yang dapat bekerja sama dengan penyedia layanan di Arab Saudi.
10. Rencana membangun Kampung Haji perlu dipertimbangkan sebab Indonesia tidak mungkin membeli tanah di Mekkah dan Madinah, kecuali menyewa lahan dengan durasi maksimal 35 tahun.***

Mekkah, 3 Desember 2024

Tim Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dan Pimpinan Komisi VIII DPR RI